

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan isu krusial bagi kehidupan manusia. Masalah lingkungan dapat muncul sebagai hasil dari kegiatan manusia yang sering kali tidak memperhatikan pembangunan lingkungan berkelanjutan (*sustainability environment*). Masalah lingkungan merupakan aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan yang sering terjadi akibat aktivitas manusia antara lain, polusi, perubahan iklim, pengurangan sumber daya alam, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi, hujan asam, banjir, dan lain-lain (Alvin et al., 2022). Munculnya masalah lingkungan tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat modern membuat lingkungan yang mereka tinggali terjadi kerusakan.

Masalah lingkungan hidup dapat terjadi karena adanya masalah moral pada diri manusia atas perilaku mereka terhadap lingkungan (Keraf, 2010). Selain itu, masalah lingkungan juga dapat terjadi akibat adanya ledakan populasi manusia dan industri yang pesat dan terjadi secara global yang memicu terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Hal tersebut diakibatkan masyarakat modern tidak dapat hidup berkelanjutan, karena manusia pada saat ini hidup pada sumberdaya yang sangat terbatas dan penggunaan yang berlebihan dari pelayanan ekosistem, serta jauh lebih cepat daripada kemampuan ekosistem untuk memperbaharui dirinya (Tenri & Yunus, 2022).

Kasus-kasus pencemaran lingkungan telah terjadi sejak abad ke 18 pasca terjadinya revolusi industri, namun setelah pertengahan abad 20 intensitas menjadi sering dan mengancam kehidupan banyak orang. Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi adalah pencemaran merkuri yang terjadi di Teluk Minamata pada tahun 1950 yang diakibatkan pembuangan limbah pabrik yang akhirnya mengontaminasi sumber pangan untuk konsumsi. Dari pangan yang terkontaminasi tersebut mengakibatkan kerusakan pada fungsi motorik dan kelainan pada janin (Effendi, 2013). Pencemaran serupa terjadi di London pada tahun 1952 yang mengalami kabut asap tebal selama empat hari yang diakibatkan

oleh polusi udara yang sebagian besar berasal dari batu bara yang bercampur dengan cuaca dingin dan berangin yang terjadi pada saat itu (Wirayudha, 2023).

Berbagai kasus pencemaran lingkungan inilah yang menjadikan isu lingkungan semakin mewacana di seluruh dunia. Selain itu, hal ini juga tidak lepas dari pengaruh buku *Silent Spring* yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ahli biologi kelautan Amerika Serikat pada tahun 1962 (Nuswantoro, 2024). Buku *Silent Spring* menggambarkan kondisi hutan dan lingkungannya yang kehilangan satwa liar akibat penggunaan pestisida kimia DDT yang digunakan untuk membasmi serangga penyebab malaria dan penyakit lainnya. Seiring dengan terbitnya buku *Silent Spring*, senator Gaylord Nelson memulai sebuah perkuliahan tentang lingkungan pada 22 April 1970. Perkuliahan ini kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi, pawai, dan gerakan lingkungan yang melibatkan ribuan sekolah dan kampus di seluruh Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 20 juta orang turut berpartisipasi dalam peringatan Hari Bumi pertama ini (Nuswantoro, 2024).

Pada tahun 1972 isu lingkungan menjadi isu bahasan resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tepatnya pada 5-16 Juni konferensi tersebut diselenggarakan di Stockholm, Swedia, dengan nama *UN Conference in The Human Environment* yang diikuti oleh wakil dari 114 negara, termasuk di antaranya Indonesia. Terdapat 26 prinsip dalam dokumen laporan konferensi yang salah satunya menyebutkan bahwa setiap jenis sumberdaya alam, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta ekosistem secara menyeluruh, perlu dijaga untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan (Sanjaya, 2017). Sebagai hasilnya, konferensi ini telah menghasilkan kerja sama antar bangsa dalam penyelamatan lingkungan hidup di dunia. Untuk itu PBB membentuk *United Nation Environment Programme* (UNEP) yang berkedudukan di Nairobi, Kenya (Effendi, 2013).

Konferensi Stockholm, tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*World Environment Day*). Keputusan ini menjadi awal dari gerakan lingkungan global yang diinisiasi oleh individu dan organisasi-organisasi lingkungan hingga saat ini. Mereka bergerak di berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, dari aksi langsung hingga desakan secara hukum untuk merespons isu lingkungan hidup. Seiring berjalannya waktu, isu lingkungan hidup terus menjadi bola salju di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara

maju yang mulai menyadari dampak buruk pembangunan bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup (Effendi, 2013). Padahal sebelumnya, isu lingkungan hidup belum menjadi agenda penting dalam pembangunan.

Pada isu lingkungan di Indonesia, terjadi berbagai krisis multidimensional: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dikarenakan pada masa Orde Baru, pembangunan tidak mengutamakan pemeliharaan lingkungan secara menyatu. Pembangunan dilakukan dengan cara mengeksploitasi kekayaan sumberdaya alam dan tenaga-tenaga rakyat, yang berujung pada kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, serta kerusakan lingkungan hidup yang terus meningkat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia (Ahmady et al., 2022). Peristiwa ini dianggap sebagai titik awal atau permulaan dari lahir dan perkembangan hukum lingkungan nasional yang modern. Selanjutnya, pada 15 Oktober 1980 lahir Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang berfungsi sebagai forum komunikasi LSM yang bergerak mengadvokasi kebijakan lingkungan hidup (Ahmady et al., 2022).

Gerakan lingkungan saat ini semakin berkembang dan merambat di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga dan memulihkan lingkungan. Terlebih dengan terjadinya kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan membuat semakin banyak pula limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kota menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat, berbagai aspek mulai dari ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berkembang pesat di kota. Hal tersebut menjadi alasan bagi masyarakat untuk datang ke kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya tren angka migrasi desa-kota di mana yang pada tahun 1960 hanya 15% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan, meningkat menjadi 31% pada tahun 1991, 50% pada tahun 2010, dan pada 2020 angka urbanisasi Indonesia mencapai 57% (Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, 2023). Di sisi lain, dari meningkatnya aktivitas manusia tersebut menimbulkan masalah lingkungan baik yang dilakukan dari sumber terkecil yakni rumah tangga maupun sektor industri.

Kota Kediri merupakan kota keempat terbesar di Jawa Timur, menempati posisi ke delapan dalam kepadatan penduduk dengan 4.436 jiwa/km² (BPS Provinsi

Jawa Timur, 2024). Kota Kediri merupakan ibukota dari Keresidenan Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Wilayah ini juga memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri, yang mempengaruhi sektor perindustrian dan perdagangan di sekitarnya. Kedudukannya sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang, Kota Kediri memiliki beragam unit usaha industri. Industri-industri ini mencakup skala yang berbeda, mulai dari industri besar hingga menengah dan kecil. Di antara industri-industri besar yang beroperasi di Kota Kediri, terdapat sektor industri rokok dan gula. Adapun Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kota ini sebagian besar fokus pada produksi makanan dan pengolahan hasil pertanian (Pemerintahan Kota Kediri, 2014). Pada sektor pariwisata, Kota Kediri memiliki berbagai destinasi menarik, baik wisata situs sejarah maupun alam. Tidak hanya itu, terdapat pula Jalan Dhoho yang merupakan pusat pertokoan padat di Kota Kediri. Di beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, kafe, resor, serta hiburan malam yang berkontribusi pada perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan pertumbuhan penduduk, industri, dan pariwisata di Kediri menimbulkan permasalahan salah satunya adalah lingkungan. Sampah menjadi permasalahan utama lingkungan di Kota Kediri. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP), kota ini menghasilkan sekitar 140 ton sampah per hari. Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pojok, di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk mengelola sampah. Namun, TPA ini mengalami *overload*, dengan sekitar 515 m³ sampah per hari. Penyebabnya adalah penanganan sampah yang belum optimal dan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara mandiri (Sembiring, 2022).

Kota Kediri juga dilewati lima sungai yang salah satunya adalah Sungai Brantas yang merupakan salah satu sungai strategis nasional. Sungai Brantas selain dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku air PDAM, pengairan pertanian, sumber mata pencaharian, juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Dari hasil pemeriksaan menggunakan metode *Atomic Absorption Spectroscopy* (AAS) dapat diketahui bahwa terdapat kandungan timbal (Pb) di Sungai Brantas (Sidjabat et al.,

2020). Menurut keterangan dari DLHKP Kota Kediri pada pengujian pada pengujian air di Sungai Brantas yang dilakukan di lima titik, Sungai Brantas ada di kelas tiga (Anugrah, 2024). Padahal, untuk dikatakan layak sebagai air minum, sungai harusnya berada di kelas satu. Selain itu, menurut uji kualitas air menggunakan metode biotilik yang dilakukan oleh *Ecological Observation and Wetland Conservation* (Ecoton) di Sungai Bruno menunjukkan sungai masuk dalam kategori tercemar sedang (Fatikhin, 2022). Kasus serupa juga terjadi di Sungai Kresek yang berubah menjadi warna hitam pekat dan bau setiap tahun pada saat musim giling tebu dan penumpukan sampah di pintu-pintu air sungai (Mashudi, 2021).

Berangkat dari permasalahan lingkungan yang ada di Kota Kediri, terbentuklah Yayasan Hijau Mandiri yang merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan (Ornop) dari Kota Kediri dan telah berbadan hukum pada tahun 2017. Yayasan Hijau Daun lahir sebagai gerakan independen dengan pendirinya yakni Endang Pertiwi yang juga merupakan anak dari tokoh pegiat lingkungan di Kota Kediri. Karena kedekatannya dengan alam sejak kecil dan melihat kondisi lingkungan di Kota Kediri yang tidak ideal, setelah menamatkan sekolah dan merantau bekerja di Bali dan Jakarta selama 19 tahun, Endang memutuskan kembali ke Kota Kediri pada tahun 2008. Namun, kondisi permasalahan lingkungan yang tidak ideal memantik Endang untuk melakukan kerja-kerja lingkungan yang diawali dengan kegiatan konservasi ke sumber-sumber mata air dan hutan. Lebih jauh, melihat masalah sampah yang ada di sekitar lingkungannya, Endang menyadari bahwa masalah lingkungan bukan hanya sekadar hutan dan air namun juga sampah. Oleh karena itu Endang mendirikan bank sampah yang nantinya menjadi cikal bakal Yayasan Hijau Daun Mandiri.

Yayasan merupakan wadah besar untuk aksi kerja lingkungan, meliputi beberapa unit kerja yakni sekolah alam, bank sampah, usaha kreatif, dan konservasi. Pada tahun 2011 Endang Pertiwi merintis Sekolah Alam Hijau Daun *Islamic Green School* yang terdiri dari jenjang pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sekolah alam ini memiliki visi untuk menanamkan kesadaran akan kecintaan terhadap alam, hal tersebut dianggap Endang penting adanya untuk menanamkan kecintaan manusia terhadap lingkungan sedari dini yakni pada masa

golden age anak (Pertiwi, 2023). Namun, sekolah alam ini telah berhenti beroperasi pada akhir tahun 2022 dan berubah menjadi sekolah lingkungan yang bergerak pada sosialisasi, edukasi, dan pelatihan ke pelajar mulai dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Tahun 2012 berdiri Bank Sampah Hijau Daun untuk membantu mengelola permasalahan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dan membantu agar masyarakat dapat hidup lebih ramah lingkungan. Adanya bank sampah tersebut masyarakat diajak untuk memilah sampah dan menukarkannya. Harapannya agar dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di jalan maupun sungai dan mengurangi beban di TPA (Hasil Prawawancara dengan Endang Pertiwi, 03-12-2023). Bank sampah hijau daun memiliki 300-an nasabah yang terdiri dari dinas-dinas pemerintahan di Kota Kediri, toko-toko, dan masyarakat sekitar (Sembiring, 2022). Selanjutnya sampah yang ada di bank sampah akan dipilah lagi, untuk sampah yang masuk dalam kategori daur ulang akan masuk ke pengepul, sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti kemasan saset yang tidak memiliki nilai jual akan diubah oleh bagian unit usaha kreatif menjadi kerajinan seperti tas, tikar, sandal, dan taplak meja yang nantinya akan dijual.

Untuk mewadahi kegiatan penyelamatan dan pelestarian lingkungan dan memperluas kerja untuk lingkungan, muncul gerakan lingkungan Komunitas Kediri *Ben Resik* yang dipelopori oleh Yayasan Hijau Daun Mandiri yang melibatkan aksi kolektif masyarakat terutama anak muda untuk bergerak menyelamatkan lingkungan. Penelitian tentang gerakan lingkungan Komunitas Kediri *Ben Resik* menarik dilakukan karena membantu memahami upaya lokal dalam mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan model bagi daerah lain yang ingin menerapkan program serupa. Pada penelitian kali ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana upaya gerakan lingkungan Komunitas Kediri *Ben Resik* dalam mengatasi masalah sampah dan pencemaran sungai di Kota Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Komunitas Kediri *Ben Resik* dengan pelopor Yayasan Hijau Daun Mandiri dalam upaya mengatasi masalah sampah dan pencemaran sungai di Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana gerakan lingkungan Komunitas Kediri *Ben Resik* yang dipelopori Yayasan Hijau Daun Mandiri dalam upaya mengatasi masalah sampah dan pencemaran sungai di Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Mengantisipasi timbulnya masalah lingkungan serupa, dan dapat dijadikan contoh model pemecah pada masalah lingkungan sama yang terjadi di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk kajian teoritis bagi civitas akademika yang ingin meneliti mengenai gerakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat rujukan dalam penelitian sejenis maupun penelitian lanjutan.